

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Tingkat dan Konsistensi Efisiensi Bidang Kesehatan dan Pendidikan

Tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan dan pendidikan selama periode 2020–2023 masih bervariasi dan belum optimal. Pada bidang kesehatan, hanya 2 provinsi (5,88%) yang mencapai efisiensi sempurna yaitu Bali dan Kalimantan Utara, sedangkan 32 provinsi (94,12%) lainnya masih belum mencapai efisiensi sempurna dalam penggunaan anggaran bidang kesehatan, Berdasarkan klasifikasi tingkat efisiensi, secara rata-rata terdapat 7 provinsi (20,59%) pada kategori efisiensi tinggi, 11 provinsi (32,35%) efisien sedang dan 14 provinsi efisien rendah.

Pada bidang pendidikan terdapat 3 provinsi (8,82%) yang mencapai efisiensi sempurna yaitu Aceh, Kepulauan Riau, dan Maluku Utara, sedangkan 31 provinsi (91,18%) belum mencapai efisiensi sempurna dalam penggunaan anggaran di bidang pendidikan. Berdasarkan klasifikasi tingkat efisiensi, secara rata-rata terdapat 10 provinsi (29,41) pada kategori efisiensi tinggi, 8 provinsi (23,53%) efisien sedang dan 13 provinsi (38,24%) efisien rendah.

Provinsi yang belum mencapai efisiensi sempurna menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh masih adanya kesenjangan (*gap*) antara capaian output aktual dan potensi output yang dapat dicapai tanpa penambahan input berdasarkan hasil analisis gap. Selain itu, hasil *cross-check* menunjukkan bahwa besarnya alokasi anggaran tidak selalu diikuti oleh tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Dengan demikian, efisiensi pengeluaran pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk menghasilkan output yang optimal.

Hasil analisis pola konsistensi efisiensi menunjukkan bahwa efisiensi pengeluaran pemerintah daerah pada kedua bidang selama periode 2020–2023 juga belum sepenuhnya stabil. Pada bidang kesehatan hanya 2 provinsi (5,88%) yang secara konsisten berada pada kategori efisiensi sempurna selama periode penelitian yaitu Bali dan Kalimantan Utara, 1 provinsi (2,94%) secara konsisten berada pada kategori efisiensi tinggi dan sedang, dan 10 provinsi (29,41%) secara konsisten berada pada kategori efisiensi rendah. Sementara itu, terdapat 5 provinsi yang menunjukkan pola peningkatan tingkat efisiensi, 3 provinsi mengalami penurunan tingkat efisiensi dan 12 provinsi menunjukkan pola fluktuatif selama periode penelitian.

Pada bidang pendidikan, terdapat 3 (8,82%) provinsi yang secara konsisten berada pada kategori efisien sempurna yaitu Aceh, Kepulauan Riau, dan Maluku Utara, 1 provinsi (2,94%) konsisten efisiensi tinggi, 6 provinsi konsisten efisien sedang dan 10 provinsi konsisten efisien rendah. Selain itu, terdapat 4 provinsi (11,76%) yang menunjukkan pola peningkatan tingkat efisiensi, 6 provinsi (17,65%) mengalami penurunan tingkat efisiensi, dan 4 provinsi (11,76%) menunjukkan pola fluktuatif selama periode penelitian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun bidang pendidikan memiliki pola konsistensi yang relatif lebih baik dibandingkan bidang kesehatan, efisiensi pengeluaran pemerintah pada kedua bidang masih bervariasi antarprovinsi dan belum sepenuhnya stabil dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut tidak terlepas dari perbedaan kualitas tata kelola pemerintah daerah dalam perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran.

Adapun hasil analisis secara bersamaan pada bidang kesehatan dan pendidikan menunjukkan bahwa tidak terdapat satu pun provinsi yang secara simultan dan konsisten mencapai efisiensi sempurna pada kedua bidang selama periode 2020–2023. Selain itu, tidak terdapat provinsi yang secara bersamaan konsisten berada pada kategori efisiensi tinggi maupun kategori efisiensi sedang pada kedua bidang. Sebagian besar provinsi, yaitu 25 provinsi (73,53%), memiliki pola konsistensi efisiensi yang berbeda antara bidang kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, terdapat 5 provinsi (14,71%) yang secara konsisten berada pada

kategori efisiensi rendah pada kedua bidang, 1 provinsi (2,94%) menunjukkan pola peningkatan pada kedua bidang, dan 3 provinsi (8,82%) menunjukkan pola fluktuatif pada kedua bidang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi pengeluaran pemerintah daerah pada bidang kesehatan dan pendidikan belum dapat dicapai secara merata pada seluruh provinsi. Perbedaan pola tersebut mengindikasikan bahwa setiap bidang memiliki karakteristik, kebutuhan dan tantangan yang berbeda dalam menghasilkan output pembangunan sehingga memerlukan strategi pengelolaan anggaran yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing bidang.

b. Faktor Determinan Efisiensi Bidang Kesehatan dan Pendidikan

Hasil estimasi regresi Tobit menunjukkan bahwa efisiensi pengeluaran pemerintah daerah pada bidang kesehatan dan pendidikan lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan struktur fiskal dibandingkan faktor demografis. Secara simultan variabel kepadatan penduduk, PDRB per kapita, dan transfer pemerintah pusat berpengaruh pada kedua bidang tersebut. Namun secara parsial, hanya variabel PDRB per kapita dan transfer pemerintah pusat yang berpengaruh signifikan, sedangkan kepadatan penduduk tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan baik pada bidang kesehatan dan pendidikan.

Variabel PDRB per kapita memiliki pengaruh positif terhadap efisiensi karena daerah dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar sehingga pemerintah daerah lebih mampu menyediakan dan mengelola layanan kesehatan dan pendidikan secara lebih optimal sehingga output kesehatan dan pendidikan dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien. Sebaliknya, variabel transfer pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap efisiensi bidang kesehatan dan pendidikan yang disebabkan karena peningkatan dana transfer tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan dan perencanaan anggaran di daerah serta masih tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap transfer pusat sehingga mendorong kurangnya insentif untuk mengelola anggaran secara efisien dan menyebabkan output yang dihasilkan tidak sebanding dengan besarnya dana yang diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, berikut beberapa saran yang sudah dirangkum:

- a. Bagi provinsi yang telah mencapai efisiensi sempurna pada salah satu bidang, seperti Provinsi Bali dan Kalimantan Utara pada bidang kesehatan serta Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, dan Maluku Utara pada bidang pendidikan, capaian tersebut perlu dipertahankan melalui pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran secara berkelanjutan untuk meminimalkan potensi pemborosan. Sementara itu, pada bidang yang belum mencapai efisiensi sempurna, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber inefisiensi dengan mengoptimalkan pencapaian output pada indikator yang masih memiliki *gap*. Selain itu, praktik pengelolaan anggaran yang telah berhasil diterapkan pada bidang yang efisien dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kinerja pada bidang lain yang masih belum efisien.
- b. Bagi provinsi yang belum mencapai efisiensi sempurna, perbaikan perlu difokuskan pada indikator yang memiliki *gap* terbesar berdasarkan hasil analisis DEA dan analisis *gap*. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan anggaran tanpa menambah alokasi dana melalui penguatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih tepat sasaran, kesenjangan antara output aktual dan output potensial dapat diperkecil.
- c. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu memberikan perhatian dan evaluasi yang lebih intensif terhadap provinsi yang menunjukkan pola konsistensi efisiensi menurun maupun fluktuatif. Bagi provinsi dengan pola efisiensi menurun, upaya perbaikan perlu difokuskan pada evaluasi terhadap faktor yang menyebabkan penurunan kinerja efisiensi baik yang berkaitan dengan perencanaan, pengalokasian maupun pelaksanaan anggaran khususnya pada indikator yang memiliki *gap* terbesar berdasarkan hasil analisis DEA agar tingkat efisiensi dapat kembali meningkat. Sementara itu, bagi provinsi dengan pola efisiensi fluktuatif, pemerintah perlu memperkuat konsistensi program melalui peningkatan sistem monitoring, evaluasi, dan pengawasan secara

berkelanjutan untuk menjaga konsistensi pengelolaan anggaran sehingga capaian efisiensi dapat lebih stabil dari waktu ke waktu. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas tata kelola pengelolaan anggaran pada kedua bidang tersebut agar pelaksanaan program lebih mampu menghasilkan output yang optimal.

- d. Mengingat tidak terdapat satu pun provinsi yang secara simultan dan konsisten mencapai efisiensi sempurna pada bidang kesehatan dan pendidikan, pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program antara sektor kesehatan dan pendidikan. Koordinasi antar perangkat daerah perlu ditingkatkan agar kebijakan, alokasi sumber daya, dan pelaksanaan program pada kedua bidang saling mendukung sehingga peningkatan efisiensi dapat dicapai secara seimbang pada kedua sektor.
- e. Berdasarkan hasil analisis faktor determinan, variabel PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan dan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki kemampuan yang lebih optimal dalam mendukung efisiensi pengelolaan anggaran publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan kapasitas ekonomi daerah melalui penguatan aktivitas ekonomi, peningkatan investasi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan agar kemampuan pembiayaan dan efektivitas pengelolaan pengeluaran pemerintah pada kedua bidang semakin meningkat.
- f. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa transfer pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan dan pendidikan, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan dana transfer mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi agar penggunaannya lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah. Selain itu, pemerintah pusat perlu memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana transfer sehingga anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran untuk meningkatkan output pada bidang kesehatan dan pendidikan.